

DJAKARTA, 8 September 1965.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat :

surat Kepala Inspektorat S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 19 Agustus 1965 No. PSEF/224/S.K. T.U/65 tentang usul penambahan perluasan S.M.P. Negeri tahun ajaran 1965 / 1966.

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi bertambah besarnya kebutuhan masyarakat yang bertudjuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengajaran menengah tingkat atas, baik umum maupun kejuruan, perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri dibebberapa tempat ;
- b. bahwa S.M.P.2 Negeri yang telah terlampau besar, sehingga penjelenggaraan pengajarannya tidak dapat berjalan lanjut, dipandang perlu dipotong menjadi dua atau tiga buah sekolah negeri yang masing-masing berdiri sendiri ;
- c. bahwa S.M.P.2 Swasta yang telah memenuhi syarat-syarat minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rentjana penjabaran sekolah-sekolah dari Departemen P.D. dan K. selanjutnya di-negerikan menjadi S.M.P.2 Negeri ;
- d. bahwa Badan Penyelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajanan atau Pemerintah Daerah setempat menjanggupi untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya ;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu ditambah pembukaan, penetapan dan pengesahan S.M.P. tahun ajaran 1965 / 1966.

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 dan 32 tentang hak Warga-Negara mendapat pendidikan dan pengajaran ;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendidikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah lanjutan Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan sekolah Negeri ;
3. Undang-undang No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran disekolah-sekolah ;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama-nama sekolah Rendah dan Sekolah Lanjutan serta singkatannya ;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Februari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama " Sekolah Rakjat 6 tahun " menjadi " Sekolah Dasar " ;
6. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo. 1959 No. 125409/S. tentang peraturan umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri ;
7. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengajaran ;
8. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. No. 92/1964 tanggal 22 Agustus 1964 tentang wewenang Direktorat Pendidikan Umum.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : membuka " Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Negeri ", selanjutnya disingkat S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertantum dalam lampiran I surat keputusan ini ;
- Ke-dua : memotong S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi dua atau tiga buah sekolah yang masing-masing berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif maupun dibidang teknik kependidikan ;
- Ke-tiga : menegerikan S.M.P. Swasta ditempat-tempat seperti tertantum dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat ;

- 1a. selama dan sesudah Pemerintah o.g. Departemen P.D. dan K. belum dapat menjangkau, maka gedung, halaman sekolah, belair dan alat-alat perlengkapan lainnya dijamin dan ditjukupi oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat;
- b. segala penagihan-pemgihan yang bersifat keperdataan, termasuk perjanjian hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 2a. perumahan guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru-guru yang bersangkutan;
- b. sewa rumah atau hotel disesuaikan dengan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu;
3. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
4. terhadap sekolah-sekolah yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-ketentuan tentang pengadjar, pegawai dan murid-murid Negeri dengan tjatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjalurannya menjadi tanggung-ajawab Panitia atau Jajasan atau pengambil inisiatif dari Sekolah yang bersangkutan;
5. khusus bagi murid-murid yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus ujian masuk S.L.P. Negeri dan penempatan murid-murid lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspektur Daerah S.M.P. yang bersangkutan;
- 6a. tiap-tiap kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;
- b. tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun-tahun berikutnya, harus seizin Kepala Inspektur Daerah S.M.P.;

Ke-lima : djikalau syarat-syarat tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengosahannya sebagai Sekolah Negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penorisan murid dikelas I;

Ko-oman : biaya penjelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini sekedar untuk tahun 1965 dibebankan pada pasal 11 B.7.4. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1965, yaitu biaya yang tersedia untuk S.M.P., dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada Mata anggaran yang selaras dengan itu;

Ketujuh : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1965.

Henteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Atas nama Menteri :
Kepala Direktorat Pendidikan Umum,

t t d

(Idris M.T. Hutapea).-

Lampiran III Surat Keputusan Menteri P.D. dan K.
 tanggal 8 September 1965
 No. 101/S.K./B/III/65-66.
 Tentang : Penerimaan S.M.P. Swasta
 tahun pelajaran 1965 / 1966.

| No. Urut | Nama dan tempat Sekolah yang dinegerikan | Djml. kelas | K e t e r a n g a n |
|----------|--|-------------|---|
| 1. | S.M.P. Swasta di Pancurbatu, Kotjamatan Alikokoting, Kabupaten Tapamuli - Utara, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 4 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di P a n c u r b a t u. b. Dirambil-alih dari Pengurus Perse- tuan Orang-orang Murid S.M.P. Swasta P a n c u r b a t u. |
| 2. | S.M.P. Swasta Manjarekat Mauli di P a r l i l i t a n, Kotjamatan Parlilitan, Kabupaten Tapamuli - Utara, Daerah tingkat I Sumatra - Utara | 7 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di P a r l i l i t a n. b. Dirambil-alih dari Pengurus S.M.P. Swasta Parlilitan. |
| 3. | S.M.P. Manjarekat Mauli di Naguaribu Kotjamatan Patangbelak, Kabupaten Tapamuli - Selatan, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 3 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di N a g u a r i b u. b. Dirambil-alih dari Panitia Pemba- ngunan S.M.P. Swasta Naguaribu. |
| 4. | S.M.P. Berbantuan di Pacarmatangger, Kotjamatan S e s e p a n, Kabupaten Tapamuli - Selatan, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 3 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di P a c a r m a t a n g g e r. b. Dirambil-alih dari Panitia Pem- banguan S.M.P. Berbantuan Pacarmatangger. |
| 5. | S.M.P. Bekal di Bekalidjulu, Kotjamatan Siempatnempu, Kabupaten D a i r i, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Bekalidjulu. b. Dirambil-alih dari P.O.M. Kotjamatan Siempatnempu. |
| 6. | S.M.P. Swasta di H a t a l, Kotjamatan H a t a l, Kabupaten Tapamuli - Selatan, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 7 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Hatal. b. Dirambil-alih dari Panitia Penje- lenggara Pembangunan S.M.P. Hatal. |
| 7. | S.M.P. Swasta di B i n a n g a, Kotjamatan Barusun - Tengah, Kabupaten Tapamuli - Selatan, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Binanga. b. Dirambil-alih dari Pengurus S.M.P. Swasta Barusun-Tengah di Binanga. |
| 8. | S.M.P. Swasta Takka di Takka, Kotjamatan S i b e l g a, Kabupaten Tapamuli - Tengah, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 4 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Takka. b. Dirambil-alih dari Panitia Penje- lenggara Pembangunan S.M.P. Swasta T a k k a. |
| 9. | S.M.P. Swasta di M a r b a u, Kotjamatan M a r b a u, Kabupaten Labuhan Batu, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 4 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Marbau. b. Dirambil-alih dari Panitia Penje- lenggara S.M.P. Swasta Marbau di M a r b a u. |
| 10. | S.M.P. Swasta Singbung di T i g a s e r a n g k a i, Kotjamatan Simpang Empat, Kabupaten K a r e, | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di T i g a s e r a n g k a i. b. Dirambil-alih dari Panitia Pemba- |

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| 11. | S.M.P. Jajasan Pembangunan di Delitua Ketjamatan D e l i t u a, Kabupaten Deli - Serdang, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 2 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Delitua. b. Diambil-alih dari Jajasan Pembangunan S.M.P. Ketjamatan Delitua. |
| 12. | S.M.P. Rakjat S i g u m p a r, Ketjamatan S i l i n e n, Kabupaten Tapauili - Utara, Daerah tingkat I Sumatra - Utara. | 6 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Sigumpar. b. Diambil-alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Rakjat Sigumpar. |
| 13. | S.M.P. Swasta Lenggajang di Kembang, Ketjamatan L e n g g a j a n g, Kabupaten Pesisir - Selatan, Daerah tingkat I Sumatra - Barat. | 7 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kembang. b. Diambil-alih dari Pengurus S.M.P. Lenggajang di Kembang. |
| 14. | S.M.P. Bantuan III Kota-Sitalang di L u b u k b a s u n g, Ketjamatan Labukbasung, Kabupaten A g a m, Daerah tingkat I Sumatra - Barat. | 4 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri II di L u b u k b a s u n g. b. Diambil-alih dari Pengurus S.M.P. Bantuan III Kota-Sitalang di Labukbasung. |
| 15. | S.M.P. Swasta di S i t u d j u h, Ketjamatan L u h a k, Kabupaten Limauuluh Kota, Daerah tingkat I Sumatra - Barat. | 3 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Situdjuh. b. Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Negeri S i t u d j u h. |
| 16. | S.M.P. Swasta di Pelalawan, Kawelanaan P e l a l a w a n, Kabupaten K a m p a r, Daerah tingkat I R i a u, | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Pelalawan. b. Diambil-alih dari Panitia Penje- kang S.M.P. P e l a l a w a n. |
| 17. | S.M.P. Utama di D u m a i, Ketjamatan D u m a i, Kabupaten Bengkalis, Daerah tingkat I R i a u, | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri Dumai. b. Diambil-alih dari Pemerintah Ketja- matan, P.O.M. dan Panitia Pempa- ngunan Gedung S.M.P. D u m a i. |
| 18. | S.M.P. "Kedaten Plerot" di G e n d e w u l u n g, Ketjamatan G e n d e w u l u n g, Kabupaten B a n t a l, Daerah Istimewa Jogyakarta. | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di G e n d e w u l u n g. b. Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Per- siapan Negeri " Kedaten Plerot " di G e n d e w u l u n g. |
| 19. | S.M.P. di D e n e h a r d j e, Ketjamatan H g a g l i k, Kabupaten S l e m a n, Daerah Istimewa J e g j a k a r t a. | 6 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Denehardje. b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri Persiapan S.M.P. Negeri Denehardje. |
| 20. | S.M.P. Persiapan Negeri di Tjoper, Ketjamatan T j o p e r, Kabupaten K l a t e n, Daerah tingkat I Djawa - Tengah. | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tjoper. b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri Sekeloh2 Lanjutun/Perguruan Tinggi Negeri K l a t e n. |
| 21. | S.M.P. Persiapan Negeri di Manisrengge Ketjamatan Manisrengge, Kabupaten K l a t e n, Daerah tingkat I Djawa - Tengah. | 7 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di M a n i s r e n g g e. b. Diambil-alih dari Panitia Pendiri Sekeloh2 Lanjutun/Perguruan Tinggi Negeri K l a t e n. |
| 22. | S.M.P. Persiapan Negeri di P e l a n h a r d j e, Ketjamatan Pelanhardje, | 5 | a. Mendjadi S.M.P. Negeri di P e l a n h a r d j e. |